JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM MENDUKUNG AKSES PENDIDIKAN BAGI SISWA DI MIN 22 HULU SUNGAI UTARA

Siti Aisyah[1], Sugianor[2], Sri Agusmila aneta Herlinda[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: aisyahkmy0987654321@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai instrumen kebijakan strategis, Program Indonesia Pintar (PIP) dihadirkan pemerintah guna memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Studi ini bermaksud mengkaji implementasi PIP dalam menopang akses pendidikan di MIN 22 Hulu Sungai Utara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; penelitian melibatkan 13 informan yang diseleksi secara purposive sampling. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, yang kredibilitasnya diuji melalui triangulasi serta member check. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi PIP pada dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara umum telah berjalan cukup baik, namun kelemahan pada dimensi disposisi masih memicu ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Implementasi program ditopang oleh faktor-faktor pendukung berupa komunikasi yang efektif, pemahaman yang baik terhadap tujuan program, responsivitas layanan, dan kerja sama antarpelaksana. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan kewenangan sekolah dalam menetapkan penerima, ketidakselarasan data penerima dengan kondisi riil, serta perpindahan siswa penerima bantuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemutakhiran data penerima, sekaligus pengoptimalan peran sekolah dalam melakukan verifikasi calon penerima manfaat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Akses Pendidikan, Administrasi Publik, Kebijakan Pendidikan

ABSTRACT

As a strategic public policy instrument, the Program Indonesia Pintar (PIP) was introduced by the Indonesian government to expand access to education for students from economically disadvantaged families. This study aims to examine the implementation of the PIP in supporting educational access at MIN 22 Hulu Sungai Utara and to identify the factors influencing its implementation. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The study involved 13 informants selected using purposive sampling. Data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, while the credibility of the findings was ensured through triangulation and member checking. The findings indicate that the implementation of the PIP has generally been effective in terms of communication, resources, and bureaucratic structure. However, shortcomings in the disposition dimension have contributed to inaccuracies in targeting eligible beneficiaries. The implementation of the program is supported by several facilitating factors, including effective communication, a clear understanding of program objectives, responsive service delivery, and strong collaboration among implementing actors. Conversely, the primary barriers include the limited authority of schools in determining beneficiaries, discrepancies between beneficiary data and actual field conditions, and the transfer of students receiving financial assistance. This study recommends strengthening coordination between the central and local governments in updating beneficiary data, while enhancing the role of schools in verifying prospective beneficiaries to improve the accuracy and effectiveness of program implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Indonesia Smart Program, Educational Access, Public Administration, Education Policy*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa bertumpu pada pendidikan sebagai fondasi utamanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan signifikan, terutama bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu yang menghadapi hambatan ekonomi. Kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu merupakan isu krusial yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah secara sistematis dan berkelanjutan.

Menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial di sektor pendidikan. Program ini merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan menyalurkan bantuan tunai kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah. PIP dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses layanan pendidikan hingga jenjang menengah, sekaligus mengurangi beban biaya personal pendidikan yang ditanggung oleh keluarga.

Program Indonesia Pintar (PIP) memegang peran krusial dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Instrumen ini menjadi salah satu pilar fundamental bagi pemerintah dalam mewujudkan target keempat Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin akses pendidikan yang inklusif, merata, dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat (UNDP, 2023). Lebih dari itu, PIP juga berfungsi sebagai perangkat strategis dalam skema perlindungan sosial terpadu, dengan intervensi sektor pendidikan yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi (World Bank, 2021). Walau demikian, sejumlah studi menegaskan bahwa efektivitas program bantuan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, mekanisme distribusi, serta kapasitas kelembagaan di aras lokal (Sumarto, Bazzi and Suryadarma, 2020).

Dalam tataran implementasi di satuan pendidikan, madrasah menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum. Sebagai institusi pendidikan berciri khas keagamaan, madrasah kerap mengalami keterbatasan sumber daya dan akses terhadap informasi kebijakan yang relatif lebih lambat daripada sekolah negeri pada umumnya (Asmani, 2019). Studi mengenai implementasi PIP di madrasah masih tergolong langka, meskipun madrasah merupakan komponen integral sistem pendidikan nasional yang menampung jutaan peserta didik dari spektrum sosial-ekonomi yang beragam. Realitas ini menempatkan madrasah sebagai wahana penting untuk menelaah efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat lokal, khususnya pada daerah berciri geografis dan sosial spesifik seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan dengan beragam temuan. Maulida (2020) dalam penelitiannya di SMAN 1 Lampihong menemukan bahwa implementasi PIP menghadapi kendala pada ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan dana. Yanti (2018) mengidentifikasi hambatan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di tingkat kelurahan yang disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sari (2020) menyoroti pentingnya akurasi data penerima dan transparansi distribusi dana dalam keberhasilan PIP. Penelitian Rahmawati (2019) dan Pratama (2021) secara konsisten menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, mekanisme penyaluran, serta pengawasan di tingkat daerah. Meskipun telah banyak penelitian

tentang PIP, masih terdapat gap penelitian yang mengkaji implementasi program di tingkat madrasah dengan karakteristik kelembagaan yang spesifik, terutama terkait dengan kewenangan sekolah dalam proses penetapan dan verifikasi penerima bantuan.

MIN 22 Hulu Sungai Utara sebagai salah satu madrasah negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan data tahun 2025, dari total 162 siswa, sebanyak 27 siswa (16,7%) merupakan penerima bantuan PIP. Angka ini menunjukkan bahwa program memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di madrasah tersebut. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan di mana masih ditemukan siswa yang tergolong mampu menerima bantuan sedangkan siswa yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya. Kedua, kurang optimalnya proses pengusulan dan pendataan karena data siswa belum terdaftar atau terbarui dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketiga, adanya siswa penerima PIP yang pindah sekolah setelah ditetapkan sebagai penerima, sehingga menimbulkan kendala dalam penyaluran dana dan pembaruan data.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang mengidentifikasi empat variabel kunci keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Pramono, 2020). Model ini dipilih karena komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat organisasi pelaksana, serta sesuai dengan konteks penelitian di mana implementasi PIP melibatkan berbagai aktor dengan tingkat kewenangan dan kapasitas yang berbeda.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberi ruang bagi peneliti untuk menggali fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi perspektif, pengalaman, dan pemaknaan yang disampaikan para informan mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (Moleong, 2022). Adapun tipe deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta serta karakteristik populasi atau wilayah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan PIP.

Penelitian berlangsung di MIN 22 Hulu Sungai Utara, yang beralamat di Jalan Amuntai-Tanjung km 7, Desa Teluk Daun RT 01, Kecamatan Amuntai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi dilandasi oleh pertimbangan bahwa madrasah ini merupakan salah satu satuan pendidikan penyelenggara PIP dengan jumlah penerima bantuan yang cukup signifikan serta mengalami beragam permasalahan implementasi yang relevan untuk diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dijaring melalui observasi langsung dan wawancara mendalam bersama para informan. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari studi pustaka dan dokumentasi yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen administratif sekolah. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Total informan berjumlah 13 orang yang meliputi Kepala Madrasah, Operator Sekolah, Guru/Pengelola PIP, 5 orang tua siswa penerima PIP, dan 5 orang tua siswa non-penerima PIP.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode. Pertama, observasi langsung guna mengamati secara sistematis proses pelaksanaan PIP di sekolah, termasuk mekanisme pendataan,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sosialisasi, dan penyaluran bantuan. Kedua, wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari para informan mengenai berbagai aspek implementasi PIP. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen resmi, seperti daftar penerima PIP, surat keputusan, petunjuk teknis, dan arsip administratif lainnya.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2022). Reduksi data ditempuh dengan merangkum, memilah, dan memfokuskan data pada hal-hal penting yang terkait dengan fokus penelitian. Penyajian data dikembangkan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis. Penarikan simpulan dilakukan secara kontinu selama penelitian berjalan sembari memverifikasi temuan yang didapatkan.

Uji kredibilitas data menerapkan beberapa teknik. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk membangun kepercayaan dan memperoleh data yang lebih mendalam. Peningkatan ketekunan diwujudkan melalui pengamatan yang cermat dan berkesinambungan. Triangulasi sumber dan metode ditempuh dengan membandingkan data yang berasal dari beragam informan dan teknik pengumpulan data. Diskusi dengan teman sejawat diselenggarakan guna mendapatkan masukan serta perspektif kritis terhadap temuan penelitian. Terakhir, member check dilakukan dengan mengonfirmasi ulang data yang telah dihimpun kepada para informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud informan (Moleong, 2022).

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi (Penyebaran Informasi yang Jelas) kepada Kelompok Sasaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara telah berjalan dengan baik. Informasi disampaikan secara berjenjang dari Kementerian Agama Kabupaten kepada pihak sekolah melalui grup WhatsApp, kemudian diteruskan kepada guru, wali kelas, siswa, dan orang tua melalui penyampaian langsung di sekolah, pertemuan wali murid, dan pemberitahuan secara lisan. Informasi yang disampaikan mencakup tujuan program, persyaratan penerima bantuan, prosedur pengumpulan berkas, dan pemberitahuan mengenai siswa yang menerima bantuan PIP. Orang tua penerima PIP mengakui bahwa penjelasan yang diberikan sudah cukup jelas karena mencakup syarat penerimaan bantuan dan pengumpulan berkas.

Namun demikian, berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti belum menemukan bukti dokumentasi berupa pertemuan langsung yang melibatkan pihak sekolah, instansi terkait, orang tua siswa, dan siswa penerima bantuan PIP secara terstruktur. Orang tua non penerima PIP juga mengakui bahwa pengetahuan mereka tentang program masih terbatas pada informasi umum sehingga belum sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan secara rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah berjalan, masih diperlukan peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi kepada seluruh orang tua siswa, bukan hanya kepada penerima bantuan. Sebagaimana disoroti oleh Yanti (2018), kurangnya sosialisasi merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal.

b. Kejelasan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) telah dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan di MIN 22 Hulu Sungai Utara.

Kepala sekolah, operator, guru, dan wali kelas memahami bahwa PIP bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Orang tua penerima PIP juga memahami bahwa program ini bertujuan membantu biaya pendidikan anak dari keluarga kurang mampu, dan bantuan yang diberikan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian perlengkapan sekolah dan seragam.

Pemahaman yang baik tentang tujuan kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi efektivitas implementasi program. Orang tua non penerima PIP pun mengakui bahwa meskipun anak mereka tidak menerima bantuan, mereka memahami bahwa program tersebut diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2019) bahwa pemahaman yang baik tentang tujuan program akan mendorong partisipasi aktif dan pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran. Pihak sekolah juga berupaya memberikan penjelasan kepada orang tua siswa mengenai tujuan program agar bantuan yang diterima dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, seragam, dan kebutuhan belajar lainnya. Dengan demikian, kejelasan tujuan kebijakan telah berkontribusi pada terciptanya pemahaman bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat tentang esensi dan manfaat program PIP.

2. Sumber Daya

a. Kemampuan Pelaksana dalam Menjalankan Kebijakan secara Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara dinilai cukup baik. Kepala sekolah bersama operator dan wali kelas saling bekerja sama dalam proses pendataan, verifikasi berkas, hingga penyampaian informasi kepada orang tua siswa. Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lebih terarah dan tertib. Guru dan wali kelas memiliki peran dalam membantu proses pendataan siswa yang layak menerima bantuan, serta memahami ketentuan program dengan baik untuk menghindari kesalahan dalam penentuan calon penerima.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis yang dihadapi pelaksana, terutama sesekali gangguan jaringan internet pada saat proses penginputan data yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan program. Operator sekolah menyatakan bahwa kemampuan dalam mengelola data siswa, melakukan verifikasi berkas, serta menginput data penerima bantuan sudah cukup baik, namun jaringan yang terkadang tidak stabil menjadi kendala operasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulida (2020) yang menemukan bahwa ketersediaan staf dan fasilitas pendukung, termasuk infrastruktur teknologi, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi PIP. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi di tingkat sekolah serta pelatihan berkelanjutan bagi pelaksana program agar kemampuan teknis mereka terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem dan prosedur yang ada.

b. Adanya Sumber Daya Finansial yang Mencukupi

Penelitian ini menemukan bahwa sumber daya finansial dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara dinilai cukup membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Dana bantuan sebesar Rp450.000 per siswa disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk membantu

kebutuhan pendidikan siswa, seperti pembelian perlengkapan sekolah, alat tulis, seragam, dan kebutuhan belajar lainnya. Orang tua penerima PIP mengakui bahwa bantuan ini sangat berarti dalam meringankan beban biaya pendidikan, meskipun belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan anak.

Pemerintah telah mempertimbangkan besaran bantuan PIP berdasarkan analisis kebutuhan dasar pendidikan, namun keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Pratama (2021), keterbatasan anggaran PIP mengharuskan adanya pengelolaan yang bijaksana oleh penerima manfaat. Orang tua siswa merasa sangat terbantu dengan adanya program ini karena dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan motivasi bagi anak untuk terus bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa PIP berhasil menjalankan fungsinya sebagai bantuan parsial yang cukup signifikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk optimalisasi pemanfaatan dana, diperlukan pendampingan dan edukasi kepada orang tua siswa agar bantuan yang diterima digunakan secara tepat sasaran untuk keperluan pendidikan anak, bukan untuk kebutuhan konsumtif lainnya.

3. Disposisi

a. Komitmen Pelaksana dalam Menjalankan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pelaksana kebijakan di MIN 22 Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya baik karena terbatas oleh faktor struktural. Penetapan penerima PIP sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kewenangan sekolah dalam menetapkan penerima bantuan tidak ada. Sekolah hanya berperan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan kebijakan tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah data penerima bantuan, meskipun ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi riil di lapangan.

Akibat dari keterbatasan kewenangan ini, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran di mana terdapat siswa dari keluarga mampu (bahkan anak PNS) yang menerima bantuan PIP, sementara anak yatim yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran belum dapat terlaksana secara optimal karena adanya hambatan struktural yang membatasi ruang gerak sekolah. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model implementasi top-down yang dikemukakan oleh Grindle, bahwa implementasi kebijakan yang terlalu sentralistik cenderung mengabaikan kondisi lokal dan mengurangi kapasitas adaptasi implementor di tingkat bawah (Widiastuti, 2022). Untuk meningkatkan komitmen pelaksana, diperlukan adanya ruang partisipasi yang lebih besar bagi sekolah dalam proses verifikasi dan validasi data penerima, serta mekanisme pengusulan calon penerima berdasarkan kondisi riil di lapangan.

b. Kejujuran Pelaksana dalam Bekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran pelaksana dalam pelaksanaan PIP di MIN 22 Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya baik karena masih terdapat kendala struktural. Pihak sekolah melaksanakan tugas sesuai dengan data dari pusat apa adanya, tanpa melakukan intervensi atau perubahan data, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi ekonomi siswa yang sebenarnya di lapangan.

Beberapa siswa yang dinilai berasal dari keluarga mampu masih menerima bantuan, sedangkan terdapat siswa yang lebih membutuhkan seperti anak yatim justru belum menerima bantuan. Perubahan kondisi ekonomi keluarga siswa yang belum diperbarui dalam sistem data menjadi kendala utama dalam menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran. Operator sekolah mengakui bahwa data yang dimiliki tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi siswa yang sebenarnya, dan perubahan kondisi ekonomi keluarga siswa yang belum diperbarui menyulitkan sekolah dalam memastikan apakah siswa tersebut masih memenuhi kriteria penerima bantuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kejujuran pelaksana tidak cukup untuk menjamin ketepatan sasaran jika data dasar yang digunakan sebagai acuan penetapan penerima tidak akurat dan tidak mutakhir. Sebagaimana disoroti oleh Sari (2020), akurasi data penerima dan transparansi dalam distribusi dana merupakan faktor kunci keberhasilan PIP yang harus terus ditingkatkan melalui mekanisme pembaruan data secara berkala.

c. Pegawai Bersifat Demokratis dalam Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah di MIN 22 Hulu Sungai Utara telah berupaya memberikan pelayanan yang demokratis dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Kepala madrasah menyatakan bahwa pihak sekolah berupaya memberikan pelayanan yang adil dan terbuka kepada seluruh siswa dan orang tua siswa tanpa membedakan latar belakang tertentu. Setiap orang tua diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai proses pendataan, persyaratan administrasi, dan pencairan bantuan.

Guru dan pengelola PIP juga menyampaikan informasi mengenai program kepada seluruh siswa tanpa membedakan penerima maupun non penerima bantuan, serta memberikan kesempatan kepada orang tua yang mendapatkan dana PIP untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan program. Orang tua penerima PIP mengakui bahwa mereka diberikan kesempatan untuk bertanya dan memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan program. Namun demikian, orang tua non penerima PIP menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui adanya informasi tentang program Indonesia Pintar di sekolah secara umum, tanpa mendapatkan penjelasan yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan sudah cukup demokratis, masih diperlukan peningkatan akses informasi bagi seluruh orang tua siswa, bukan hanya bagi penerima bantuan. Sikap demokratis pelaksana ini merupakan modal sosial yang penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program, namun perlu didukung oleh sistem informasi yang lebih inklusif dan transparan.

4. Struktur Birokrasi

a. Tersedianya Standar Prosedur Operasional yang Jelas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara belum berjalan optimal. Operator sekolah mengakui bahwa meskipun dulu ada prosedur teknis dalam pelaksanaan PIP, namun petugas sebelumnya sudah pindah tugas sehingga pemahaman tentang SOP menjadi terbatas. Pelaksanaan prosedur administrasi juga menghadapi kendala ketika terjadi perpindahan siswa penerima PIP ke sekolah lain setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, yang berdampak pada proses penyaluran dana dan pembaruan data penerima.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kaku dan prosedur yang tidak fleksibel dapat menjadi hambatan dalam implementasi program, terutama ketika menghadapi dinamika di lapangan seperti mobilitas siswa. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Sari (2020) yang menyoroti bahwa mobilitas siswa menjadi tantangan dalam menjaga akurasi data penerima bantuan. Namun demikian, terdapat mekanisme alternatif yang dilakukan oleh sekolah, seperti melalui usulan dari anggota DPR yang meminta data siswa yang belum mendapatkan PIP untuk diajukan sebagai calon penerima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP formal belum sepenuhnya optimal, terdapat upaya adaptasi dan inovasi di tingkat lokal untuk mengatasi kendala prosedural. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan penyempurnaan SOP yang lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, serta peningkatan kapasitas pelaksana dalam memahami dan menjalankan prosedur yang ada.

b. b. Adanya Fragmentasi (Pembagian Tanggung Jawab) atau Tugas yang Jelas Antar Bagian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara telah berjalan dengan baik. Kepala madrasah menyatakan bahwa setiap guru, operator, dan wali kelas sudah memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaan PIP. Guru wali kelas membantu dalam pendataan dan verifikasi berkas siswa, sedangkan operator bertugas mengelola data dan administrasi yang berhubungan dengan sistem PIP, serta memasukkan data siswa ke sistem dan memperbaiki data jika ada kesalahan.

Kepala sekolah bertugas sebagai pengawas untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan PIP berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya pembagian tugas yang jelas ini membantu pelaksanaan program berjalan lebih teratur dan efektif sehingga setiap pihak dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Orang tua siswa juga mengakui bahwa pihak sekolah sudah memiliki pembagian tugas yang baik dalam pelaksanaan program, dan mereka sebagai penerima hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sekolah. Meskipun tidak ditemukan dokumen khusus yang secara lengkap menjelaskan pembagian tugas PIP, beberapa berkas administrasi yang tersedia menunjukkan adanya keterlibatan kepala sekolah, operator, guru, dan wali kelas dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi atau pembagian tugas yang jelas menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi kebijakan, karena menciptakan kepastian peran dan tanggung jawab antar pelaksana, sekaligus memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan program.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar

Berdasarkan analisis terhadap empat variabel implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III, studi ini berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PIP di MIN 22 Hulu Sungai Utara. Faktor pendukung utama mencakup terjalinnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan kebijakan, sikap pelayanan yang demokratis dan responsif dari aparatur sekolah, serta sinergi yang solid di antara para pelaksana program. Keseluruhan faktor tersebut membentuk lingkungan implementasi yang kondusif dan turut memperlancar operasionalisasi program di level lapangan.

Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi terbatasnya kewenangan sekolah dalam penetapan penerima PIP, mengingat keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kondisi ini mengakibatkan sekolah tidak memiliki kapasitas untuk memperbarui data penerima meskipun ditemukan inkonsistensi dengan realitas di lapangan. Kesenjangan antara data penerima bantuan dengan situasi ekonomi aktual siswa menjadi kendala

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

serius yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran dan berpotensi memicu konflik sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, perpindahan siswa penerima PIP ke sekolah lain turut menjadi hambatan administratif yang mengganggu proses pencairan dana dan pembaruan basis data penerima.

Temuan ini mengukuhkan argumentasi Grindle yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan itu sendiri, melainkan juga oleh konteks implementasinya, termasuk kapasitas para implementor dan kondisi lingkungan setempat (Widiastuti, 2022). Dalam konteks PIP, meskipun desain kebijakan telah dirancang secara memadai, keterbatasan data dan kewenangan di tingkat lokal menimbulkan kesenjangan antara rumusan kebijakan yang bersifat sentralistik dengan kenyataan di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan implementasi yang lebih adaptif dan partisipatif, di mana sekolah dan komunitas lokal memperoleh ruang untuk menyampaikan masukan serta melakukan verifikasi terhadap data calon penerima manfaat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara secara umum berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan. Dari aspek komunikasi, transmisi informasi dan kejelasan tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik. Pihak sekolah telah menyampaikan informasi secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai saluran komunikasi, dan terjadi pemahaman yang baik mengenai tujuan program sebagai bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Dari aspek sumber daya, kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dinilai cukup baik dengan adanya kerja sama antar pelaksana dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis. Sumber daya finansial yang disalurkan pemerintah juga dinilai cukup membantu siswa meskipun belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan. Dari aspek struktur birokrasi, terdapat pembagian tugas yang jelas antar bagian di sekolah yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, meskipun masih terdapat kendala terkait prosedur administrasi ketika terjadi perpindahan siswa penerima bantuan.

Kelemahan utama terletak pada aspek disposisi, di mana keterbatasan kewenangan sekolah dalam menetapkan dan mengubah data penerima bantuan berdampak pada ketidaktepatan sasaran. Penetapan penerima yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan DTKS menyebabkan ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi ekonomi siswa yang sebenarnya di lapangan. Masih ditemukan siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara siswa yang lebih membutuhkan belum memperolehnya. Perubahan kondisi ekonomi keluarga yang tidak diperbarui dalam sistem data menjadi kendala utama dalam memastikan ketepatan sasaran.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pemerintah pusat, dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data calon penerima PIP secara berkala. Sekolah perlu diberikan ruang untuk melakukan verifikasi dan memberikan masukan terhadap data penerima yang telah ditetapkan. Kepala madrasah diharapkan meningkatkan ketelitian dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyampaian informasi kepada orang tua dan siswa. Orang tua siswa

juga diharapkan aktif memberikan informasi apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun perpindahan sekolah agar proses administrasi dan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, J.M. (2019) 'Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang Madrasah di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), pp. 215–234.

Maulida, P. (2020) 'Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan'. Amuntai.

Moleong, L.J. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.

Pratama, A. (2021) 'Analisis Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Permasalahannya di Daerah', *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), pp. 210–220.

Rahmawati, I. (2019) 'Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam Mendukung Wajib Belajar di Indonesia', *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 7(1), pp. 45–53.

Sari, D.P. (2020) 'Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu', *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2), pp. 123–134.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, S., Bazzi, S. and Suryadarma, D. (2020) 'Social Protection in Indonesia: A Review of Programs and Evidence', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(1), pp. 1–36. Available at: https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1707620.

Widiastuti, I. (2022) *Kebijakan Publik*. Sumatra Barat: PT Insan Cendekia Mandiri Group.

World Bank (2021) *Indonesia's Social Protection System: Pathways to Inclusive Growth*. Jakarta.

Yanti, W. (2018) 'Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan'. Medan.